



**PERKEMBANGAN KECAMATAN JATINANGOR MENJADI  
KOTA PERGURUAN TINGGI TAHUN 1982 - 2013**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun Oleh:**

**Raksi Pegah Savorta  
13030113120023**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Raksi Pegah Savorta, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 6 Agustus 2020

Penulis,

Raksi Pegah Savorta

NIM 13030113120023

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

*“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu, Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, Yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*

(QS. Al-Insyirah 1-8)

*“Without training, they lack knowledge. Without knowledge they lacked confidence. Without confidence, they lacked victory.”*

Julius Caesar

Dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua yang hebat, saudara, para sahabat, guru  
dan para pejuang pendidikan

## HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui,  
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ESH', written over a horizontal line.

Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum  
NIP 196705281991032001

Skripsi dengan judul "Perkembangan Kecamatan Jatinangor Menjadi Kota Perguruan Tinggi Tahun 1982 - 2013" yang disusun oleh Raksi Pegah Savorta (13030113120023) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada tanggal 6 Agustus 2020.

Ketua,



Prof. Dr. Sutedjo Kuwat Widodo, M.Si  
NIP 196005151985031004

Anggota I,



Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum  
NIP 196705281991032001

Anggota II,



Dr. Haryono Rinardi, M.Hum  
NIP 196703111993031004

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Nurhayati, M. Hum.  
NIP 196610041990012001

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkembangan Kecamatan Jatinangor Menjadi Kawasan Pendidikan Tahun 1982 – 2013.” Skripsi ini disusun sebagai syarat menempuh ujian akhir Program Strata-1 di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro..

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan dengan rasa hormat ungkapan terima kasih kepada: Dr. Nurhayati, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, melatih keberanian dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum, selaku dosen wali yang dengan arif telah memberikan pencerahan dan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis.

Disertai rasa hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Sutejo Kuwat Widodo, M.Si, dan Dr. Haryono Rinardi, M.Hum, yang telah memberikan perhatian, kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan pula kepada segenap pengajar yang istimewa di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Tak lupa juga para staf administrasi Departemen Sejarah dan perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang ramah dan sigap, terkhusus Mbak Fatma, Mas Oscar, dan Pak Martoyo. Terima kasih pula kepada Mbak Noor Naelil Masruroh, S. M. Hum yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang serta memberi motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Secara khusus penulis berterima kasih kepada staf Pemerintahan Kecamatan Jatinangor terutama Bapak Endang Rohmayudi, S.pd, serta Ibu Elis Limarni Tampubolon yang berkenan memberi informasi penting dan salinan arsip monografi yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini. Juga kepada warga Jatinangor Pak Dadang Ramadan, Ibu Pipih, Pak Jaenal serta Pak Dadang (pegawai Ikopin) yang penuh keramahan dan keterbukaan memberi banyak informasi penting serta arsip yang sangat bernilai bagi penulis. Terima kasih pula kepada staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, Pusat Informasi Kompas Biro Jawa Tengah, serta BAPPEDA Kabupaten Sumedang yang telah mempermudah penulis dalam mendapatkan arsip yang dibutuhkan untuk skripsi ini. Penulis juga ingin berterima kasih secara tidak langsung kepada para penulis serta peneliti yang karyanya digunakan dalam penelitian ini.

Secara pribadi penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang selalu setia mendengarkan keluh kesah serta memberi dukungan tanpa lelah kepada penulis, orang-orang hebat yang penulis miliki, Dra Iip Saadah dan Drs Sulistio Budi Raharjo. Terima kasih pula pada Mamih Leles, tante-tante, beserta kakak dan adik sepupu yang telah memberikan dukungannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para sahabat di Departemen Sejarah, Yusron, Reza, Zata, Mega, Arif, Ahmad, Fanada, Ilham, Abi dan lain-lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas warna persahabatan dalam perjalanan kuliah penulis. Semoga kita semua selalu ada dalam rahmat Allah SWT.

Skripsi ini pada hakikatnya masih jauh dari sempurna. Kekurangan dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis baik dalam hal tata tulis maupun substansi, mendorong harapan penulis atas kritik dan saran yang membangun dari para pembaca budiman. Meski sedikit, semoga skripsi ini dapat

berkontribusi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau bagi siapa pun yang memerlukannya khususnya demi kepentingan terkait historiografi Indonesia.

Semarang, 6 Agustus 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN JATINANGOR</b>	<b>18</b>
A. Kondisi Geografis	18
B. Asal-Usul Jatinangor	21
C. Kondisi Administratif	26
D. Kondisi Demografi	32
E. Kondisi Sosial Ekonomi	33
F. Kondisi Sosial Budaya	34
1. Keagamaan	35
2. Tradisi Masyarakat	37
<b>BAB III PERKEMBANGAN TATA RUANG KOTA KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG</b>	<b>40</b>
A. Faktor Pendukung Pengembangan Kota	40
1. Universitas	40
2. Geografis	43

3. Sumber Daya Manusia	44
4. Mobilitas Penduduk	46
B. Perkembangan Sosial Ekonomi	49
1. Perdagangan	51
2. Transportasi	56
3. Pertanian	59
4. Industri	62
C. Perencanaan Tata Ruang Kota	66
1. Pengembangan Tata Ruang Kota	66
2. Konsep Tata Ruang Kota	74
<b>BAB IV DAMPAK NEGATIF PERKEMBANGAN TATA RUANG KECAMATAN JATINANGOR</b>	82
A. Dampak Terhadap Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	82
1. Kesenjangan Sosial	82
2. Terkikisnya Budaya Lokal Masyarakat	84
B. Dampak Terhadap Perekonimian Masyarakat	88
C. Dampak Terhadap Lingkungan	94
D. Upaya Menanggulangi Dampak Negatif Perkembangan Tata Ruang Kota Kota Kecamatan Jatinangor	99
1. Upaya Menanggulangi Permasalahan Sosial Ekonomi dan Budaya	101
2. Upaya Menanggulangi Permasalahan Lingkungan	106
<b>BAB V SIMPULAN</b>	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	116
<b>DAFTAR INFORMAN</b>	122
<b>LAMPIRAN</b>	124

## DAFTAR SINGKATAN

AKOP	: Akademi Koperasi Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APDN	: Akademi Pemerintahan Dalam Negeri
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa
CBD	: Community Base Development
DAMRI	: Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia
GDP	: Gross Domestic Product
IKOPIN	: Institut Manajemen Koperasi Indonesia
IPDN	: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ITB	: Institut Teknologi Bandung
Jatos	: Jatinangor <i>Town Square</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPT	: Kawasan Perguruan Tinggi
KSN	: Kawasan Strategis Nasional
KSP	: Kawasan Strategis Provinsi
NU	: Nahdatul Ulama
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PTK	: Pusat Kegiatan Tingkat Kecamatan
PWP	: Pengembangan Wilayah Pembangunan
PKL	: Pusat Kegiatan Lokal
RTBL	: Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUTRK	: Rencana Umum Tata Ruang Kota
SD	: Sekolah Dasar

SDM	: Sumber Daya Manusia
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
STPDN	: Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPAS	: Tempat Pembuangan Akhir Sampah
TPSS	: Tempat Pembuangan Sampah Sementara
TTU	: Texas Tech University
Undip	: Universitas Diponegoro
Unpad	: Universitas Padjadjaran
Unwim	: Universitas Winaya Mukti
UMR	: Upah Minimum Regional
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

## DAFTAR ISTILAH\*

<i>Backward linkage effect</i>	: kegiatan sektor unggulan yang membutuhkan sektor lain untuk kelancaran kegiatannya
<i>Change</i>	: perubahan
<i>De Grote postweg</i>	: jalan raya pos
<i>Demand</i>	: permintaan
<i>Distorted development</i>	: pembangunan ekonomi yang tidak diiringi dengan pembangunan sosial yang memadai sehingga muncul dampak sosial dari pembangunan
<i>Feeder road</i>	: jalan alternatif sebagai penyalur arus transportasi dari jalur utama
<i>Forward linkage effect</i>	: kegiatan dimana sektor unggulan mampu mendorong sektor lain supaya lebih berkembang
<i>Growth</i>	: pertumbuhan
<i>Kawasan Periphery</i>	: kawasan pinggiran yang dilihat aspek jaraknya jauh dari pusat kota dan ada di perbatasan dengan wilayah yuridiksi kabupaten lain
<i>Massive</i>	: padat atau tidak berongga
<i>Multiplier effect</i>	: efek dalam ekonomi dimana peningkatan pengeluaran nasional mempengaruhi pendapatan dan konsumsi menjadi lebih tinggi dibandingkan jumlah sebelumnya
<i>Pole of attraction</i>	: pusat daya tarik
<i>Voluntary planned Migration</i>	: perpindahan atau migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakan migrasi yang direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela

---

\* Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta Kabupaten Sumedang	18
2.2	Peta Pembangunan Jalan Raya Pos (1808-1809)	22
2.3	Menara Loji Jatinangor	23
2.4	Pembangunan Jalur Kereta Api Rancaekek–Tanjungsari Tahun 1916	24
2.5	Jembatan Cincin Jatinangor	24
2.6	Peta Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung	27
2.7	Peta Administratif Kecamatan Jatinangor	28
2.8	Arak-Arakan Kuda Renggong	37
3.1	Persentase Konsumen Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Latar Belakang Di Sekitar Kawasan Pendidikan Tinggi	42
3.2	Foto Jatinangor <i>Town Square</i>	56
3.3	Penggunaan Lahan Kecamatan Jatinangor	61
3.4	Lokasi Kawasan Pendidikan Tinggi	68
3.5	Kondisi Kawasan Jatinangor tahun 1987 sebelum dibangun Jalan Lingkar Jatinangor	70
3.6	Kondisi Kawasan Jatinangor tahun 2012 setelah selesai dibangun Jalan Lingkar Jatinangor	71
3.7	Peta Peruntukan Lahan Kecamatan Jatinangor Tahun 2003	72
3.8	Peta Zonasi Penggunaan Lahan Jatinangor 2002	75
4.1	Cara Berpakaian Masyarakat Lokal Jatinangor Tahun 1980an	85
4.2	Cara Berpakaian Mahasiswa Jatinangor Tahun 1980an	89
4.3	Warung Tradisional Masyarakat Lokal Jatinangor	90
4.4	Wisma GKPN (Gabungan Koperasi Pegawai Negeri)	100
4.5	Peta Rancangan Jaringan Jalan Jatinangor	111
4.6	Peta Reaktivasi Rel Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari	112

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Data Curah Hujan Kecamatan Jatinangor	20
2.2	Luas Wilayah per Desa di Kecamatan Jatinangor	30
2.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Jatinangor	32
2.4	Jumlah Keluarga Sejahtera 2013	34
2.5	Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Jatinangor 1982-2013	36
3.1	Jumlah Mahasiswa di Jatinangor	41
3.2	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Dirinci Menurut Desa Tahun 2008	46
3.3	Rekapitulasi Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Wilayah Kecamatan Jatinangor tahun 2013	52
3.4	Lembaga Perekonomian Di Tingkat Desa Kecamatan Jatinangor	52
3.5	Rekapitulasi Bank Pemerintah Dan Bank Non Pemerintah Di Wilayah Kecamatan Jatinangor	53
3.6	Jenis Kendaraan angkutan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2013	58
3.7	Jenis Prasarana Angkutan Tahun 2013	59
3.8	Penggunaan Lahan di Jatinangor Tahun 1981, 1991, 2000	60
3.9	Luas Perguruan Tinggi di Jatinangor	68
3.10	Kebijakan Relokasi hingga Penyelesaian Permasalahan serta Aksi Kolaboratif	77
4.1	Tindak Kejahatan di Kecamatan Jatinangor Tahun 2005- 2009	87
4.2	Perubahan daya serap sektor ekonomi terhadap tenaga kerja tahun 2000-2005 di Jatinangor	88
4.3	Luas lahan Berdasarkan Penggunaan Tahun 2005	93

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
3.1 Grafik Pertumbuhan Mahasiswa	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
A	Peraturan Bupati Sumedang nomor 12 tahun 2013 tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan strategis provinsi pendidikan jatinangor	124

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perkembangan Kecamatan Jatinangor Menjadi Kota Perguruan Tinggi Tahun 1982 - 2013”. Skripsi ini menyajikan dinamika yang dialami Kecamatan Jatinangor dalam prosesnya dijadikan Kota Perguruan Tinggi. Adapun masalah yang disajikan adalah bagaimana perkembangan serta permasalahan timbul dari kebijakan tersebut, serta upaya dalam mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis dengan mencakup empat langkah yaitu *heuristik* atau pengumpulan sumber, kemudian kritik sumber yang dalam penelitian ini hanya menggunakan kritik intern untuk mengetahui kredibilitas sumber, interpretasi fakta dengan mengaitkan fakta yang satu dan lainnya, serta yang terakhir yaitu *historiografi* atau penulisan kembali peristiwa sejarah secara deskriptif analitis. Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi perkotaan.

Antara tahun 1977 hingga tahun 1982, jumlah mahasiswa yang menuntut ilmu di Kota Bandung naik hingga melebihi 200 persen, dari 36.000 mahasiswa bertambah menjadi 80.518 mahasiswa. Kenaikan jumlah civitas akademi ini tentu menimbulkan kebutuhan akan lahan untuk kampus baru, hunian mahasiswa, dan sarana prasarana lainnya. Kebutuhan akan lahan inilah yang membuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat mengajukan untuk menciptakan magnet baru di wilayah sekitar agar perkembangan kota Bandung tetap seimbang. Pengajuan ini diterima oleh Pemerintah daerah Jawa Barat dengan memilih Jatinangor yang berjarak 23 Km dari Bandung menjadi magnet baru bagi arus urbanisasi dengan memindahkan sebagian universitas di Bandung ke kawasan tersebut. Relokasi tersebut dimulai pada tahun 1982, dengan mulai beroperasinya IKOPIN di Jatinangor. Disusul pendirian Universitas Padjajaran (UNPAD) pada tanggal 14 Mei 1982, lalu Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di tahun 1981, serta kampus Universitas Winaya Mukti (UNWIM) pada 1986. Pada tahun 1989, oleh Gubernur Jawa Barat secara resmi Jatinangor dijadikan sebagai Kota Perguruan Tinggi (KPT) dengan pembangunan ke depannya diarahkan sebagai kota pendidikan. Hal tersebut menciptakan banyak pertumbuhan dalam berbagai bidang, namun juga menciptakan permasalahan perkotaan baru, seperti macet, banjir, kekumuhan, dll. Perencanaan pembangunan Jatinangor menjadi tidak terarah, sehingga pertumbuhan kota melenceng dari rencana semula yaitu KPT. Pada tahun 2010, bersamaan dengan pembentukan Bandung sebagai kota metropolitan yang membutuhkan kawasan penyangga, Jatinangor juga mulai kembali diperhatikan dengan serius. Perencanaan pembangunannya mulai diarahkan kembali menjadi KPT, dengan fokus utamanya adalah menyelesaikan masalah perkotaan dan memberikan identitas pendidikan pada kota tersebut.

## **ABSTRACT**

*This thesis entitled "The Development Jatinangor District To Become City of University 1982-2013". This thesis presents the dynamics of Jatinangor District in the process of making the City of Higher Education. Issues discussed are developmental problems arising from the policy, as well as efforts to overcome them.*

*This study uses a critical historical method by completing the following steps of heuristics or sources, then criticizing sources which in this study only use apprenticeship criticism to seek credibility of sources, pouring facts by linking existing and other facts, and the last is historiography or analytically accessible again. This thesis uses the discussion of urban sociology.*

*Between 1977 and 1982, the number of students studying in Bandung rose to over 200 percent, from 36,000 students which increased to 80,518 students. This increase in the number of academics requires land for new campuses, student residences, and other infrastructure. The need for land is what makes the West Java Regional Development Planning Agency request that new magnets in the surrounding area be developed so that the development of the city of Bandung is still met. This proposal was received by the Regional Government of West Java by choosing Jatinangor which was returned 23km from Bandung to become a new magnet for the current of urbanization by using most universities in Bandung to the area. The relocation began in 1982, with IKOPIN operating in Jatinangor. It was followed by Padjadjaran University (UNPAD) on May 14, 1982, then at the Academy of Domestic Administration (APDN) in 1981, as well as the campus of Winaya Mukti University (UNWIM) in 1986. In 1989, the Governor of West Java was officially used by Jatinangor as a Higher Education City (KPT) with future development directed as an education city. This creates a lot of growth in various fields, but also creates new competition, such as traffic jams, floods, slums, etc. Jatinangor's development planning was not directed, so the growth of the city deviated from the original plan, namely KPT. In 2010, Bandung was simultaneously held as a metropolitan city that needed a buffer zone, Jatinangor also began to return with serious consideration. Development planning began to be redirected back to KPT, with the focus on solving problems in solving urban problems and giving education an identity to the city.*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Kecamatan Jatinangor merupakan salah satu kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Kawasan yang berjarak sekitar 23 Km dari Kota Bandung ini sudah tidak terdengar asing oleh masyarakat sekitar Jawa Barat, terutama untuk para pelajar yang sedang atau berniat untuk memasuki universitas-universitas di sekitar kawasan tersebut. Kawasan yang memiliki luas sebanyak 2.622 hektar ini, sejak tahun 1982 telah berdiri lima perguruan tinggi terkemuka, yakni universitas Padjajaran (UNPAD), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Winaya Mukti (Unwim),<sup>1</sup> meski pada tahun 2010 aset kampus Unwim harus diambil alih oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). Pengambilalihan terjadi karena Unwim memiliki masalah keuangan dan tidak dapat melanjutkan program pendidikannya. Asset Unwim yang terbengkalai pun diintegrasikan secara bertahap ke dalam Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan dimulai oleh pangalihan pegawai, dan disusul dengan pengambilalihan lahan pada tahun 2013.<sup>2</sup> Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Perguruan Tinggi (KPT) sejak 1989, dan pada tahun 2010 berstatus sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan dalam proyek nasional Kawasan Cekungan Bandung.

Dalam tulisan Purnawan Basundoro dalam bukunya Pengantar Sejarah Kota, dijelaskan bahwa sejarah kota merupakan suatu kajian yang berbeda dengan

---

<sup>1</sup>Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor: 11 Tahun 1992 tentang Penataan Tanah Bekas Perkebunan Jatinangor Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

<sup>2</sup>Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Institut Teknologi Bandung Nomor: 004/1.1.A/KM/2013 tentang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

kajian sejarah pada umumnya. Menurut perspektif evolusioner, perkembangan suatu kota selalu dikaitkan dengan pedesaan. Paradigma modernisasi kemudian akan membawa sebuah perubahan, sehingga setiap desa kemudian akan berkembang menjadi kota, dan kota akan berkembang melewati tahapan-tahapan perkembangan tertentu. Selain itu juga setiap kota merupakan hasil perkembangan dari suatu desa. Tahap-tahap perkembangan itu bersifat linear dan universal.<sup>3</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Jatinangor yang penuh sesak dengan mahasiswa, dulu tidak lain hanyalah perkebunan karet yang diselimuti oleh hutan-hutan belantara. Sampai 1940-an, tidak banyak penduduk yang berani membuat rumah di sana, karena saat itu keadaan jatinangor masih sangat rawan dan menakutkan. Seperti misalnya penyerangan babi hutan, harimau dan terutama perampok yang bermarkas di bukit curam cadas pangeran yang tidak jauh dari Jatinangor.<sup>4</sup> Lalu bagaimana Jatinangor dapat berubah?

Secara historis Perkebunan Jatinangor berstatus Hak Erfpacht<sup>5</sup> atas nama NV. Maatschappij Tot Exploitatie der Ondernemingen Nagelaten sejak tahun 1941. Kawasan tersebut dimiliki oleh Mr. W. A. Baron Beced, yang bekedudukan di Den Haag. Haknya berakhir pada tanggal 31 Desember 1861, dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk.II/16/KD/1964. Hak Erfpacht atas tanah Pekebunan Jatinangor dinyatakan hapus karena hukum dan

---

<sup>3</sup>Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm.20

<sup>4</sup>“Jatinangor, Sarang Macan Jadi Markas Mahasiswa”, *Kompas*, 2 Januari 1996, hlm 14.

<sup>5</sup>Hak Erfpacht adalah hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun yang dinamakan “pacht.” Hak erfpacht dapat juga diartikan sebagai hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, hasil atau pendapatan (Pasal 720 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan untuk sementara pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Negara Karet.<sup>6</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 17/HGU/1965 tanggal 22 Maret 1965, pengelolaan Perkebunan Jatinangor yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Negara Karet dicabut kembali, dan Hak Guna Usahanya diberikan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Lalu perkebunan yang luasnya kurang lebih sekitar 907,3740 Ha itu, 1966 diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan Daerah Gemah Ripah, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Hal tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 33/B.II/BPD.2/SK/1966, kemudian dikukuhkan kedudukannya dan diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Kerta Gemah Ripah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/Dp.040/PD/1976 tanggal 28 Desember 1976. Ternyata dalam perkembangannya hasil pengusahaan Perkebunan Karet Jatinangor menjadi kurang menguntungkan mengingat tanamannya sudah tua dan tidak produktif lagi serta kurangnya dana yang tersedia untuk merehabilitasi kebun serta tanamannya.<sup>7</sup>

Usulan agar Jatinangor dijadikan sebagai kota perguruan tinggi mulai muncul pada tahun 1977. Ini terkait dengan keadaan di kota Bandung yang dirasa sudah tidak mampu lagi menampung kegiatan pendidikan tinggi. Terbukti dengan kepadatan penduduk rata-rata kota Bandung pada 1980 yang mencapai 17.206 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah mahasiswa sendiri sudah mencapai 60.128 orang, yang tersebar di 16 perguruan tinggi, institut, dan universitas; 25 akademi; serta 15 lembaga penelitian. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dengan adanya keterbatasan lahan, pemerintah daerah perlu mengambil keputusan untuk

---

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor: 11 Tahun 1992 tentang Penataan Tanah Bekas Perkebunan Jatinangor Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor: 11 Tahun 1992 tentang Penataan Tanah Bekas Perkebunan Jatinangor Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

memindahkan sebagian aktivitas pendidikan tinggi yang ada di Kota Bandung. Terpilihlah kawasan bekas perkebunan karet Jatinangor, yang saat itu sudah tidak produktif lagi, sebagai solusi untuk permasalahan tersebut<sup>8</sup>

Relokasi dimulai sekitar akhir dekade tahun 1970-an hingga awal dekade 1980-an. Perguruan tinggi pertama yang berdiri secara resmi di Jatinangor adalah Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) pada tanggal 7 Mei 1982. Kegiatan perkuliahannya dimulai saat itu juga berdasar surat Kopertis Wilayah IV Jawa Barat nomor: 039/1982 yang masih dianggap sebagai peningkatan AKOP “12Juli” Bandung. Pendaftaran nama IKOPIN sendiri di Jatinangor baru diresmikan pada 1984 berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 133/1984. Disusul pendirian Universitas Padjajaran (UNPAD) pada tanggal 14 Mei 1982 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593-384 tentang Pelepasan Sebagian Hak Atas Tanah dan Tanaman Perkebunan Jatinangor yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Universitas Pajajaran. UNPAD sendiri baru memulai perkuliahan pada 1987. Lalu di tahun 1981 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) mulai membangun kampusnya, dan baru memulai perkuliahan ditahun 1989. Serta terakhir, kampus Universitas Winaya Mukti (UNWIM) pada 1986, yang diresmikan pada 1991.<sup>9</sup>

Dalam pengembangannya pada tahun 1988, lahan UNPAD diperluas sebanyak 75 Ha. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593-32-318 tanggal 11 Maret 1988. Ditahun yang sama tepatnya tanggal 13 September 1988, berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593-305 IKOPIN juga diberi pengembangan lahan.<sup>10</sup> Akhirnya pada 1989, sesuai dengan keputusan

---

<sup>8</sup>“Jatinangor, Sarang Macan Jadi Markas Mahasiswa”, *Kompas*, 2 Januari 1996, hlm 14.

<sup>9</sup>BAPPEDA Kabupaten Sumedang, *Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan* (Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang, 2009), hlm. 1.1

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor: 11 Tahun 1992 tentang Penataan Tanah Bekas Perkebunan Jatinangor Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

Gubernur Nomor 593/SK.83-PLK/1989 Jatinangor ditetapkan sebagai KPT diikuti pengambilalihan lahan yang diperuntukan untuk, *pertama*, UNPAD dengan pemberian lahan seluas 175 Ha; *kedua*, Universitas Wiyana Mukti seluas 51 Ha; *ketiga*, IKOPIN seluas 28 Ha; Kampus APDN Nasional yang sekarang menjadi STPDN seluas 280 Ha; serta untuk keperluan lainnya akan diperuntukan juga 140 Ha untuk *greenbelt*, 66 Ha untuk pramuka, dan 194 Ha ditujukan untuk lahan konservasi.

Dalam pelaksanaannya, meski Surat Keputusan agar perencanaan kota dipusatkan menjadi KPT sudah dikeluarkan tahun 1989, namun fasilitas kota sendiri masih jauh untuk disebut Kota Perguruan Tinggi. Sebuah KPT pasti harus memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses kegiatan perguruan tinggi. Dibutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk memenuhi syarat tersebut, sehingga penetapan SK Gubernur Nomor 593/SK.83-PLK/1989 pada dasarnya bukanlah akhir, melainkan sebuah permulaan dijalankannya program KPT.

Dalam pengembangannya menjadikan Jatinangor sebagai KPT bukanlah perkara mudah. Banyak persoalan yang timbul dan sulit diatasi. Seperti misalnya pengembangan kampus dapat menimbulkan kepadatan bangunan dan mengganggu ketinggian tanah, sehingga tidak jarang terjadi banjir di kawasan Jatinangor;<sup>11</sup> sarana prasarana transportasi sangat minim, seperti rambu lalu lintas, kurangnya trotoar, sempitnya badan jalan, sehingga puncaknya pada 1996 terjadi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk dipenuhinya sarana tersebut;<sup>12</sup> Selain itu ada juga persolan mengenai sengketa tanah, meskipun SK gubernur telah ditetapkan, seperti yang pernah terjadi ditahun 1991 antara UNPAD dan pemilik sertifikat;<sup>13</sup> dan masih banyak lagi persoalan lainnya.

---

<sup>11</sup>“Dipertanyakan, Pengembangan Jatinangor menjadi Kawasan Pusat Perguruan Tinggi”, *Kompas*, 5 Desember 1989, hlm 9.

<sup>12</sup>“Setelah Menelan 8 Nyawa, Kawasan Jatinangor Dibenahi”, *Kompas*, 2 Januari 1996, hlm 14.

<sup>13</sup>“Pengembangan Kampus Unpad Diadukan ke Polda Jabar”, *Kompas*, 13 April 1991, hlm 6



Pendirian perguruan tinggi di daerah Jatinangor juga menimbulkan dampak di kawasan Jatinangor baik itu kepada masyarakat, maupun kepada lingkungannya. Tercatat jumlah penduduk Jatinangor tahun 1980 yang hanya berjumlah 40.000 jiwa, meningkat tajam menjadi 100.000 jiwa pada tahun 1994<sup>14</sup> dan pada 2013 jumlah tersebut meningkat lagi hingga 115.448 jiwa, dengan kepadatan mencapai 4.406,41/Km<sup>2</sup>.<sup>15</sup> Jumlah mahasiswa di KPT Jatinangor terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1982 yang hanya berdiri satu universitas saja, yaitu IKOPIN hanya terdapat 355 mahasiswa saja. Jumlah ini meningkat hingga delapan kali lipat di tahun 1986, yaitu 2.978 orang. Di tahun berikutnya, jumlah tersebut meningkat secara signifikan dengan kedatangan Unpad, yakni melonjak hingga mencapai 9.026 mahasiswa. Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada 2003 jumlah mahasiswa di Jatinangor tembus hingga mencapai angka 37.566 orang.<sup>16</sup>

Peningkatan jumlah mahasiswa di daerah Jatinangor berdampak besar kepada masyarakat, terutama dibidang ekonomi. Secara umum struktur ekonomi masyarakat Jatinangor yang awalnya mencerminkan ekonomi pedesaan dengan pertaniannya, mulai berubah menjadi cerminan perkotaan. Dimana mengingat luas lahan pertanian yang semakin berkurang seiring dengan perkembangan kota Jatinangor. Sudah sekitar 1.342 industri yang berdiri di tahun 2013. Mulai dari perekonomian sektor riil, seperti fotokopi, laundry, warung, dan sebagainya; hingga didukung dengan munculnya pusat-pusat perbelanjaan supermaket, mall bahkan hotel berbintang.

---

<sup>14</sup>“Jatinangor, Sarang Macan Jadi Markas Mahasiswa”, *Kompas*, 2 Januari 1996, hlm 14.

<sup>15</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, *Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2013* (Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang, 2014), hlm. 33

<sup>16</sup> Debi Vidyasari, *Dinamika Harga Lahan Di Sekitar Wilayah Perguruan Tinggi Di Kecamatan Jatinangor* (Tugas Akhir pada Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, Dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, 2008), hlm. 47-48

Bertolak dari penjelasan di atas, dapat diangkat permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu perkembangan tata ruang kota sebagai dampak yang ditimbulkan dari di jadikannya Jatinangor sebagai Kota Perguruan Tinggi memiliki sisi positif dan negatif. Berdasar pada permasalahan utama tersebut, maka untuk mempermudah analisis pada penelitian ini penulis akan dipandu dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana perkembangan Kecamatan Jatinangor sebagai Kota Perguruan Tinggi dari tahun 1982-2013? *Kedua*, apa saja permasalahan yang dihadapi Jatinangor sebagai Kota Perguruan Tinggi? *Ketiga*, apa saja upaya untuk menanggulangi permasalahan Jatinangor?

## **B. Ruang Lingkup**

Penulisan proposal ini dibatasi oleh tiga ruang lingkup yaitu ruang lingkup temporal, ruang lingkup spasial, dan ruang lingkup keilmuan. Ketiga ruang lingkup digunakan untuk melakukan pembatasan agar pembahasan yang dilakukan tidak meluas kemana-mana dan keluar dari pembahasan.

Lingkup temporal skripsi ini adalah antara tahun 1982 sampai dengan 2013. Secara resmi penetapan Jatinangor untuk dikembangkan sebagai KPT adalah di tahun 1989, sesuai dengan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/SK.83-PLK/1989, yang berisi untuk mengalihfungsikan pengelolaan lahan/tanah bekas Perkebunan Jatinangor sebagai kompleks Perguruan Tinggi yang pada saat itu seluruhnya berpusat di Kota Bandung. Lahan tersebut akan dibagi kepada Kampus Unpad seluas 175 ha, Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Winaya Mukti seluas 51 ha, Kampus IKOPIN seluas 28 ha, dan Kampus APDN yang sekarang menjadi IPDN seluas 280 ha. Juga untuk keperluan lainnya akan diperuntukan 140 ha untuk *greenbelt*, 66 ha untuk pramuka, serta 194 ha ditujukan untuk lahan konservasi.

Penetapan perencanaan Jatinangor sebagai KPT baru muncul di tahun 1989, namun jauh sebelum itu ternyata relokasi sudah dimulai sekitar tahun 1982, dengan didirikannya Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) sebagai perguruan tinggi pertama di Jatinangor. Kegiatan perkuliahan dimulai pada tahun 1982, namun peresmian IKOPIN di Jatinangor sendiri baru terjadi pada 1984

berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 133/1984. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka dirasa perlu bagi skripsi ini untuk memulai dari tahun 1982 bukan tahun 1989, agar dapat diketahui asal-muasalnya penetapan KPT ini di Jatinangor. Batas akhir skripsi ini adalah tahun 2013 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumedang nomor 12 tahun 2013 tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan strategis provinsi pendidikan jatinangor, dimana RTBL 2013 tersebut merupakan pedoman terbaru bagi pembangunan Jatinangor selanjutnya<sup>17</sup>

Sementara, Lingkup spasial dalam skripsi ini adalah daerah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ini diambil karena Kecamatan Jatinangor dijadikan sebagai Kota Perguruan Tinggi Negeri untuk menampung aktivitas pendidikan di kota Bandung yang sudah membludak. Sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat No. 593/SK.83-PLK/1989, mengenai penetapan Jatinangor sebagai KPT dengan memanfaatkan lahan bekas perkebunan karet. Terdiri dari sepuluh desa dengan dua desa sebelah barat masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Bandung, yaitu Desa Cileunyi Wetan dan Cileunyi Kulon; serta 8 desa berada pada wilayah administrasi Kabupaten Sumedang, yaitu Desa Cilayung, Cileles, Hegarmanah, Jatiroke, Cikeruh, Sayang, Cibeusi, dan Cipacing<sup>18</sup>

Untuk lingkup keilmuan, skripsi yang berjudul “Perkembangan Kecamatan Jatinangor Menjadi Kota Perguruan Tinggi Tahun 1982 - 2013” ini termasuk kedalam kajian sejarah perkotaan. Sejarah kota merupakan sejarah yang memiliki kajiannya yang sangat luas, seperti sejarah ekonomi, politik, ekologi, dan sebagainya. Selain itu, sejarah kota juga mengkaji mengenai kota, orang kota, dan kejadian di kota.<sup>19</sup> Pembahasan untuk skripsi ini sendiri akan difokuskan pada

---

<sup>17</sup>Addenum Kedua Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Institut Teknologi Bandung Nomor: 004/1.1.A/KM/2013 tentang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

<sup>18</sup>BAPPEDA, *Laporan Akhir Studi*, hlm 1.2

<sup>19</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: UGM Press, 2003), hlm. 63-64

pembahasan mengenai struktur, tata ruang, dan permasalahan kota yang ditinjau dari segi sosialnya.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, di dalam penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut:

*Pertama*, untuk menjelaskan perkembangan Kecamatan Jatinangor sebagai Kota Perguruan Tinggi dari tahun 1982-2013. *Kedua*, untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi Jatinangor sebagai Kawasan Perguruan Tinggi. *Ketiga*, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan di Jatinangor.

### D. Tinjauan Pustaka

Literatur-literatur sekunder, berupa buku-buku, skripsi, dan artikel dari majalah maupun surat kabar sejauh ini sangat membantu penulis dalam penyusunan tulisan ini.

Pustaka *pertama* adalah skripsi Debi Vidyasari yang berjudul “*Dinamika Harga Lahan Di Sekitar Wilayah Perguruan Tinggi Di Kecamatan Jatinangor.*”<sup>20</sup> Isi dari pustaka ini secara garis besar adalah mengenai perkembangan Kecamatan Jatinangor yang pesat berdampak pula terhadap kenaikan harga lahan di daerah tersebut. Sejak 1982 hingga 2005, di Kecamatan Jatinangor sudah berdiri sebanyak empat Perguruan tinggi, yaitu IKOPIN, UNPAD, Unwim, dan STPDN. Dengan berdirinya keempat perguruan tinggi tersebut, meningkatkan jumlah pendatang ke daerah tersebut terutama mahasiswa. Dengan kedatangan mahasiswa yang cukup konsumtif, menciptakan peningkatan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini menjadi magnet bagi para investor yang menganggap peningkatan kualitas dari daerah tersebut, sehingga menciptakan peningkatan *demand* dan meningkatkan harga lahan di Kecamatan Jatinangor. Titik temu antara skripsi Debi Vidyasari dengan penelitian skripsi ini terdapat pada spasial, temporal, dan tema utamanya

---

<sup>20</sup>Debi Vidyasari, *Dinamika Harga Lahan*,

yang berfokus kepada harga lahan. Harga lahan merupakan bagian dari tema skripsi ini yang fokusnya lebih luas yaitu tata ruang. Sehingga skripsi Debi Vidyasari ini diharapkan dapat melengkapi sebagian skripsi ini dalam tema yang sesuai.

Pustaka *kedua* adalah buku berjudul “*Global Universities and Urban Development*”, yang diedit oleh Wim Wiewel and David C. Perry<sup>21</sup>. Buku ini berisi kajian-kajian mengenai universitas-universitas di dunia yang memiliki hubungan yang selaras antara kota, universitas, dan masyarakat. Di dalam salah satu babnya yaitu bab 9, dibahas mengenai Jatinangor yang ditulis oleh Wilmar Salim. Keterkaitan pustaka ini terhadap penelitian ini karena pustaka ini membahas mengenai permasalahan pembangunan yang dialami Jatinangor dari didirikannya universitas di daerah tersebut. Antara 1977 hingga 1982 jumlah mahasiswa perguruan tinggi di Bandung meningkat dari 36000 ke 80518 orang. Peningkatan minat perguruan tinggi tersebut membutuhkan lahan dan fasilitas pendukung, padahal Bandung sendiri saat itu sudah penuh sesak dengan peningkatan populasi sejak 1970 hingga 1990 sebanyak 2,06 juta jiwa. Melihat permasalahan itu, Badan Perencanaan Daerah, mulai mencari solusi wilayah sebagai pengembangan perkotaan. Terpilihlah sebuah lahan perkebunan karet yang tidak produktif lagi yaitu Kecamatan Cikeruh yang sekarang menjadi Kecamatan Jatinangor. Dalam perpindahannya menjadi magnet baru bagi pendatang ternyata menciptakan banyak masalah.

Pustaka *ketiga* yang dipakai berjudul “*Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan.*”<sup>22</sup> Buku ini ditulis oleh BAPPEDA Kabupaten Sumedang 2009. Berisi mengenai kajian Jatinangor dilihat dari kelayakannya dikatakan sebagai sebuah perkotaan. Perkembangan Jatinangor sebagai Kota Perguruan Tinggi ternyata membawa arus perkembangan yang

---

<sup>21</sup>Wim Wiewel and David C. Perry, “*Global Universities and Urban Development*” (Massachusetts : Lincoln Institute of Land Policy, 2008)

<sup>22</sup>BAPPEDA, Kabupaten Sumedang, *Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan,*

pesat, namun hal ini ternyata tidak dibarengi dengan penataan yang tepat. Sehingga hal tersebut membuat Jatinangor seakan menjadi kota yang tidak terawat, meski dipenuhi hiruk pikuk orang. Demi mengatasi hal ini, pemerintah daerah merencanakan Jatinangor agar statusnya ditingkatkan menjadi perkotaan agar pengelolaannya dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah Provinsi. Pustaka ini memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena dapat memberikan gambaran mengenai Jatinangor hingga menjadi kota yang berkembang pesat namun memiliki banyak permasalahan di tahun 2009.

Pustaka *keempat* adalah artikel dalam majalah UNIKOM vol. 9 hlm. 2 berjudul “*Pengaruh Kegiatan Perguruan Tinggi Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan.*” Disusun oleh Eva Nursawitri, Romeiza Syafriharti Dan Lasti Yossi Hastini. Berisi mengenai studi tentang pengaruh perguruan tinggi, terhadap lalu lintas di Jatinagor, serta efisiensi kelayakan dari sarana yang ada setiap harinya.<sup>23</sup> Pustaka ini berkaitan dengan penelitian ini karena membahas salah satu bagian dari penelitian skripsi ini dalam bidang transportasi. Pustaka ini menggambarkan bahwa angka penarikan kendaraan oleh Universitas terhadap jalan di Jatinangor ternyata tidak terlalu besar. Memang terjadi peningkatan jumlah penarikan ketika jam-jam perkuliahan, namun hal ini tidak menciptakan dampak kemacetan bagi jalan raya Jatinangor bagian utara. Jadi diharapkan pustaka ini dapat memberikan gambaran terhadap kondisi jalan raya Jatinangor yang terbagi menjadi arus kiri dan kanan, yang memiliki kepadatan masing-masing.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perkembangan menurut G. Kartasapoetra diidentifikasi sebagai istilah pembangunan, yaitu sebagai urutan dari berbagai perubahan sistematis yang mencakup tentang perubahan tertentu. Berkembang berarti perkembangan yang terkait dengan berurutan.<sup>24</sup> Perkembangan berkaitan dengan istilah pertumbuhan

---

<sup>23</sup>Eva Nursawitri, *Pengaruh Kegiatan Perguruan Tinggi Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan* (Majalah Ilmiah Unikom, Volume 9 hlm 2)

<sup>24</sup>G. Kartasapoetra, Hartini, *Kamus Sosiologi & Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 36.

(*growth*) dan perubahan (*change*). Perkembangan seringkali membawa perubahan demikian pula perubahan mengakibatkan perkembangan.<sup>25</sup>

Kecamatan Jatinangor setelah kedatangan universitas mengalami perkembangan yang signifikan. Tercatat jumlah penduduk Jatinangor tahun 1980 yang hanya berjumlah 40.000 jiwa, meningkat tajam menjadi 100.000 jiwa pada tahun 1994. Jumlah mahasiswa di Jatinangor juga terus berkembang dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 1982 yang hanya 355 orang saja, setiap tahun meningkat hingga pada 2006 mencapai angka 29.328 orang.<sup>26</sup>

Konsep kota menurut S.Menno dan Mustamin Alwi, yakni *town* dan *city*. Dalam bahasa Indonesia, *town* cenderung disepadankan dengan kota kecil, sementara *city* diartikan dengan kota besar. Penduduk *town* masih saling mengenal dengan akrab, perilaku sosial dalam town lebih mirip dengan pola pedesaan apabila dibandingkan dengan pola kota besar (*city*) atau kota metropolitan.<sup>27</sup>

Kecamatan Jatinangor termasuk ke dalam golongan *city* atau kota besar, terlihat dari jumlah penduduk wilayah kecamatan Jatinangor yang berjumlah sekitar 100.000 di tahun 1994 dengan pertumbuhan penduduk mencapai 2.04%. Selain itu, sebagian besar dari Kecamatan Jatinangor sudah berwajah perkotaan yang kebanyakan ditujukan untuk prasarana pendidikan. Hanya sedikit dari wilayah Jatinangor yang masih berwujud pedesaan, bahkan Kecamatan Jatinangor memiliki lahan pertanian terkecil diantara kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang.

Perguruan tinggi menurut KBBI, artinya adalah tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi (seperti sekolah tinggi, akademi, universitas).<sup>28</sup> Dunia

---

<sup>25</sup>M. Supriyadi, Sastrosupono dan Surahatono Siswopangipto, *Desa Kita* (Bandung: Alumni,1984), hlm. 64

<sup>26</sup>Debi Vidyasari, *Dinamika Harga Lahan*, hlm. 47-48

<sup>27</sup>S. Menno dan Mustamin Alwi, *Antropologi Perkotaan* (Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 1992), hlm 26.

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002).

Perguruan Tinggi tidak hanya dapat menjadi sarana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi proses pembelajaran di kampus juga diharapkan dapat menjadi wahana yang penting untuk merubah pola pikir masyarakat dalam menuju terwujudnya masyarakat sipil madani.

Kota perguruan tinggi berarti adalah kota yang dikhususkan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi. Jatinangor adalah suatu kota yang memiliki empat perguruan tinggi, yakni UNPAD, IKOPIN, STPDN, dan ITB. Kota ini juga dalam pengembangannya memang ditujukan sebagai KPT, sesuai dengan 593/SK.83-PLK/1989. Penetapan fungsi Jatinangor sebagai kota pendidikan tinggi mempengaruhi perkembangan kota tersebut dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi bukan hanya karena masuknya sivitas akademika tetapi juga karena migrasi pelaku kegiatan perdagangan dan jasa. Pada awalnya Jatinangor merupakan kawasan perdesaan yang didominasi oleh pertanian. Beberapa desa mengalami perubahan ke arah ekonomi yang lebih beragam. Sebagai contoh, di Desa Cipacing selain pertanian, berkembang pula industri dan kerajinan rumah tangga.

Sejarah Kota merupakan suatu kajian yang berbeda dengan kajian sejarah pada umumnya. Sejarah kota mengkaji suatu peristiwa yang terjadi pada sebuah kota. Peristiwa yang dikaji harus memiliki hubungan terhadap kota itu, karena kota mengacu pada pengertian ruang geografi yang membedakan dengan ruang-ruang lain, maka hanya peristiwa yang berkaitan dengan ruang kota saja yang dianggap sebagai bagian dari sejarah kota. Artinya, peristiwa tersebut dipicu karena keberadaan ruang kota yang spesifik, yang berbeda dengan ruang – ruang lainnya<sup>29</sup> Dari satu segi sejarah kota dapat dimasukkan ke dalam sejarah lokal, dan dari segi lain dapat dimasukkan ke dalam kajian sejarah lainnya, seperti sejarah ekonomi, politik, ekologi, dan sebagainya.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhan dan hubungan

---

<sup>29</sup>Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, hlm. 5



antara orang-orang dalam masyarakat.<sup>30</sup> Pendekatan yang digunakan khususnya adalah sosiologi kota. Sosiologi kota merupakan bagian dari ilmu sosiologi umum yang baru dikenal setelah berakhirnya perang dunia pertama sekitar awal abad XX.<sup>31</sup> Sosiologi kota adalah sosiologi yang mempelajari tentang perkembangan dan struktur kota; proses kota dan desa; tipologi kota dan perubahan sosial kota.

#### **F. Metode Penelitian**

Ilmu sejarah memiliki metode penelitian yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya serta memiliki kekhasan tersendiri pada setiap tahapnya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika metode sejarah diartikan sebagai suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah.<sup>32</sup> Untuk menyusun skripsi dalam rangka mengikuti metode penulisan kritis<sup>33</sup> penulis melalui langkah-langkah berikut:

*Heuristik*, yaitu melakukan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen tertulis dan lisan dari peristiwa masa lampau sebagai sumber sejarah. Dalam skripsi yang berjudul “Perkembangan Kecamatan Jatinangor Menjadi Kota Perguruan Tinggi Tahun 1982 - 2013” ini, digunakan beberapa sumber yang berasal dari berbagai tempat, seperti Arsip Daerah Jawa Barat, Kantor Pemerintah daerah Jawa Barat, Kantor Kabupaten Sumedang, Kantor Kabupaten Bandung, perguruan tinggi-perguruan tinggi di Jatinangor, BPS Sumedang, BAPPEDA Sumedang, Badan Arsip Kabupaten Sumedang, Arsip Nasional Republik Indonesia, Depo Kompas, Depo Pikiran Rakyat dan sebagainya. Serta juga beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 16.

<sup>31</sup>Schrool, *Modernisasi* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm 284.

<sup>32</sup>Wasino. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah* (Semarang: Unnes Press, 2007), hlm. 9

<sup>33</sup>Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975), hlm. 15

Diponegoro (Undip), Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Undip, Perpustakaan UPT Widya Puraya Undip, Perpustakaan Jurusan Sejarah Unpad, Perpustakaan Daerah Jawa Barat, dan sebagainya.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari zaman yang sama dimana peristiwanya terjadi. Sumber primer tertulis yang untuk skripsi ini diantaranya Surat Keputusan Pemerintah Jawa Barat, Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Statistik Kabupaten Sumedang, Statistik Kecamatan Jatinangor, Surat Kabar Kompas, Surat Kabar Pikiran Rakyat, peta kepemilikan lahan, SK Bupati Sumedang, SK Walikota Bandung, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Sementara untuk sumber lisan, diperoleh melalui wawancara dari berbagai pihak seperti, dinas daerah Jatinangor, dinas daerah Sumedang, Pihak Perguruan Tinggi, Masyarakat Jatinangor, dan lain-lain yang dianggap kompeten untuk dijadikan narasumber. Nantinya hasil wawancara ini hanya akan dijadikan sebagai pelengkap dari sumber-sumber tertulis yang lebih kuat kedudukannya. Juga bila memungkinkan nantinya akan digunakan juga sumber-sumber foto agar memperjelas gambaran mengenai Jatinangor.

Sumber sekunder merupakan sumber tambahan untuk melengkapi data-data yang tidak didapat dari sumber primer. Informasinya tidak berasal dari zaman terjadinya peristiwa sejarah. Sumber tersebut diantaranya, Berita tertulis yang sejaman yang dimuat di surat kabar. Selain itu, juga sebagai literatur yang merupakan buku atau hasil penelitian dari ahli-ahli yang sudah ada. Sejauh ini penyusunan tulisan ini lebih banyak berpedoman pada literatur-literatur sekunder berupa buku-buku, tesis, dan artikel-artikel dari majalah, surat kabar.

*Kritik*, yaitu melakukan pengujian terhadap sumber baik berupa kritik intern maupun kritik ekstern. Walaupun begitu, namun karena keadaan yang tidak memungkinkan seperti masalah ekonomi dan pengetahuan, maka dalam penelitiannya penulis tidak akan menggunakan kritik ekstern. Sebagai gantinya, penulis akan mencari sebanyak mungkin sumber agar dapat melakukan kolaborasi dengan melakukan kritik interen. Kritik intern dilakukan untuk menguji

kredibilitas suatu sumber yaitu pernyataan yang sungguh-sungguh dapat dipercayai kebenarannya.

*Interpretasi* atau sintesa fakta yaitu Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta – fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau.<sup>34</sup> Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta – fakta atau bukti–bukti sejarah. Proses penelitian sejarah yang bermuara pada metode sejarah dengan empat tahap, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, pada hakekatnya berpuncak pada tahap interpretasi. Heuristik dan kritik berfungsi untuk menyeleksi sumber – sumber sejarah, sehingga mendapatkan fakta – fakta atau bukti–bukti sejarah yang valid dan reliabel. Sedang dalam tahap interpretasi dan historiografi fungsi utamanya terletak pada interpretasi. Setelah proses interpretasi terhadap fakta – fakta atau bukti – bukti sejarah selesai dilakukan, barulah proses historiografi dimulai.

*Historiografi* atau rekonstruksi yaitu penulisan sejarah yang berupa penyusunan fakta-fakta sejarah untuk ditulis menjadi sejarah deskriptif naratif. Yang hasilnya berupa tulisan sejarah, yang disini berarti sebuah skripsi. Dibutuhkan keterampilan untuk langkah metode sejarah ini, agar karya yang dihasilkan dapat enak untuk dibaca, sehingga menarik minat pembaca.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bagian pokok pembahasan, yaitu:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi mengenai latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 memberikan gambaran umum dari Kecamatan Jatinangor, ditinjau dari kondisi demografi, sosial, ekonomi, geografi dan sejarahnya.

Bab 3 membahas mengenai perkembangan Kec.Jatinangor menjadi Kota Perguruan Tinggi setelah didirikannya Universitas dari 1982 hingga 2013. Hal yang dibahas terutama dalam aspek sosial ekonomi dan perubahan fisiknya.

---

<sup>34</sup>Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm 63

Bab 4 membahas mengenai dampak problematika yang dihadapi Jatinangor dari 1982 hingga 2013. Problematika yang dibahas mencakup aspek sosial budaya ekonomi dan lingkungan, seperti terpinggirkannya masyarakat asli, lunturnya kebudayaan lokal, banjir, kemacetan, sampah dan lain-lain; serta dijelaskan pula upaya penanggulangannya

Bab 5 merupakan kesimpulan dari seluruh bab diatas, dan merupakan bagian dari jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.